

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KAMIS, 8 MARET 2012**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Maret 2012
Pukul : 19.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : Pembahasan perubahan RKA K/L Perubahan APBN TA. 2012
Kehadiran : 20 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI
29 orang izin

HADIR :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si | ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill |
| ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH | ◆ Alexander Litaay |
| ◆ H. Darizal Basir | ◆ Zainun Ahmadi |
| ◆ Drs. Ramadhan Pohan, MIS | ◆ H.M Gamari Sutrisno |
| ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc | ◆ Drs. H. Akhmad Muqowam |
| ◆ Boki Ratu Nita Budhi Susanti, SE. | ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |
| ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd | ◆ Rindoko Dahono Wingit, SH.,M.Hum |
| ◆ Arif Wibowo | ◆ Mestariyany Habie, SH |
| ◆ H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH | ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si |

IZIN :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si | ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si |
| ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA | ◆ Drs. Soewarno |
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,MA |
| ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe | ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si |
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ Agus Purnomo, S.IP |
| ◆ Nurcahyo Anggorojati | ◆ H. Rahman Amin |
| ◆ Drs. H. Djufri | ◆ KH. Aus Hidayat Nur |
| ◆ Rusminiati, SH | ◆ H. Yan Herizal, SE |
| ◆ Gede Pasek Suardika, SH.,MH | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ◆ Paula Sinjal, SH, M.Si | ◆ H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH |
| ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si | ◆ Drs. H. Fauzan Syai'e |
| ◆ Dr. Ir. H. Eko Sarjono Putro, MM. | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ◆ Ir. Bambang Sutrisno | ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si |
| ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si | ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si |
| ◆ Ir. Markus Nari, M.Si | |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional dibuka pukul 19.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si /F-PAN

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) pada TA. 2012 mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp. 3.957.875.318.000,- sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-01/MK.2/2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012, BPN RI yang dipergunakan untuk pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan BPN RI di seluruh Indonesia pada tahun 2012.
2. Berdasarkan sumber dana dalam penganggaran, anggaran BPN-RI tahun 2012 berasal dari sumber dana publik atau Rupiah Murni (RM) 63 % dan sumber dana yang berasal dari masyarakat atau PNBPN 37 % yang berasal dari sebagian penerimaan negara yang diijinkan untuk digunakan sebagai sumber dana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Pertanahan Nasional.
3. Penerimaan PNBPN terdiri dari penerimaan PNBPN yang bersifat umum maupun PNBPN yang bersifat fungsional. PNBPN yang bersifat fungsional tersebut berasal dari dana masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan kepada BPN RI dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
4. Berdasarkan anggaran belanja, anggaran BPN-RI terdiri dari Belanja pegawai sebesar 29 % untuk pembayaran gaji, tunjangan pegawai, Sedangkan Belanja Barang 62 % untuk belanja barang operasional dan non operasional dan Belanja Modal sebesar 9 % yang meliputi belanja modal peralatan, mesin, bangunan termasuk rehabilitasi kantor.
5. Pada TA. 2012, BPN RI melaksanakan prioritas nasional yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah yaitu pada prioritas Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Energi, Iklim dan Investasi serta Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, Dan Pasca-Konflik.
6. BPN RI pada TA. 2012 telah melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 76.709.782.000,- terhadap satuan kerja dilingkungan BPN RI sebagai berikut :
 - a. Satuan Kerja yang di lakukan pemotongan anggaran meliputi Unit kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pusat
 - b. Satuan Kerja Unit Daerah yaitu Satuan Kerja Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSedangkan anggaran program yang di lakukan pemotongan anggaran meliputi :
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - b. Program Pengelolaan Pertanahan Nasional
 - c. Program Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI

7. Terkait dengan anggaran BPN RI tahun 2012, terdapat anggaran yang masih diblokir dan belum memperoleh persetujuan DPR RI yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, sebesar Rp.112.353.600.000,- yang meliputi Rp. 50.000.000.000,- untuk pembangunan manajemen arsip modern dan Rp.62.353.600.000,- untuk pembangunan dan renovasi gedung kantor serta pengadaan peralatan dan mesin

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terhadap perubahan alokasi anggaran BPN TA 2012 yang semula sebesar **Rp 3.957.875.318.000,-** menjadi sebesar **Rp 3.881.165.536.000,-** Komisi II DPR RI menyetujui pemotongan anggaran sebesar **Rp 76.709.782.000,-** namun Komisi II DPR RI meminta BPN untuk menyampaikan alasan dan rincian pemotongan anggaran tersebut pada masing-masing kegiatan berdasarkan jenis belanja.
2. Terhadap anggaran BPN TA 2012 yang masih diblokir dan belum memperoleh persetujuan dari DPR RI yaitu pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebesar **Rp 112.353.600.000,-** Komisi II DPR RI belum dapat mencabut pemblokiran tersebut sebelum mendapatkan penjelasan secara rinci dan komprehensif dari BPN terkait kegiatan-kegiatan yang anggarannya masih di blokir tersebut.
3. BPN bersepakat untuk segera menyampaikan rincian anggaran dan daerah yang menjadi lokasi Prona Reforma Agraria dan penyerahan sertifikat transmigrasi lokal di tingkat Kabupaten pada TA 2012 kepada Komisi II DPR RI selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2012.
4. Akan diagendakan RDP dengan BPN khusus untuk membahas penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang sudah disampaikan ke Komisi II DPR RI.

Rapat ditutup Pukul 22.30 WIB.

**JAKARTA, 8 MARET 2012
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
WAKIL KETUA,**

ttd

Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
A-126